

ELITE LOKAL DAN POLITIK ELEKTORAL: Relasi Kuasa Perbanditan Sosial dalam Pemenangan Kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur

Darsono¹, Basa Alim Tualeka², Aam Waro' Panotogomo³, Moh. Ali Shulthoni⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

e-mail: darsono_fbs@uwks.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30742/juispol.v6i1.5375>

Received: 6 April 2026

Revised: 4 Mei 2026

Accepted: 13 Mei 2026

Abstrak

Pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak hanya menjadi arena kompetisi formal antarkandidat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor informal yang memainkan peran strategis dalam mobilisasi dukungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat dalam politik elektoral di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, dengan menggunakan perspektif *social banditry* Eric Hobsbawm dan konsep *moral economy* James C. Scott. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif dan metode deskriptif-etnografis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Jember dengan tambahan di Situbondo dan Banyuwangi, dengan informan yang meliputi kandidat, tim pemenangan, elite lokal (kyai, ulama, preman, pengusaha), serta pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite lokal berfungsi sebagai *broker politik* yang menjembatani relasi antara kandidat dan pemilih melalui mekanisme transaksional yang dalam banyak kasus berkembang menjadi perbanditan sosial. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi logistik politik, tetapi juga dengan legitimasi sosial yang dibangun melalui nilai-nilai moral ekonomi. Relasi kuasa yang terbentuk bersifat simbiotik namun menghasilkan konsekuensi struktural berupa politik biaya tinggi, ketergantungan kepala daerah terpilih terhadap jaringan elite, serta melemahnya kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci: *bandit_sosial*, *elite_lokal*, *moral_ekonomi*, *politik_elektoral*, *relasi_kuasa*

Abstrac

Local head elections in Indonesia are not merely arenas of formal competition among candidates but also involve informal actors who play strategic roles in mobilizing political support. This study aims to analyze the power relations among candidates, local elites, and voters in electoral politics in the Tapal Kuda region of East Java, employing the perspectives of *social banditry* as developed by Eric Hobsbawm and the concept of *moral economy* proposed by James C. Scott. This research adopts a qualitative approach within an interpretive paradigm and applies a descriptive-ethnographic method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis in Jember, with additional data from Situbondo and Banyuwangi. Informants include electoral candidates, campaign teams, local elites (such as *kyai*, religious leaders, local strongmen, and business actors), as well as voters. The findings reveal that local elites function as political brokers who mediate the relationship between candidates and voters through transactional mechanisms that, in many cases, evolve into forms of social banditry. These practices are not only related to the distribution of political resources but are also socially legitimized through moral-economic values. The resulting power relations are symbiotic in nature but produce structural consequences, including high-cost politics, the dependency of elected leaders on elite networks, and the weakening of local democratic quality.

Keywords: *electoral_politics*, *local_elites*, *moral_economy*, *power_relations*, *social_banditry*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia pascareformasi. Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung serta memperkuat akuntabilitas politik di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, proses elektoral sering kali tidak berjalan secara linear antara kandidat dan pemilih, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan jaringan kekuasaan informal yang berkembang di tingkat lokal (Hadiz, 2010; Aspinall & Berenschot, 2019).

Di banyak wilayah, terutama di daerah dengan struktur sosial yang kuat seperti Tapal Kuda Jawa Timur, hubungan antara kandidat dan pemilih dimediasi oleh elite lokal. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kultural antara elite politik dan masyarakat menciptakan kebutuhan akan perantara yang mampu menjembatani relasi tersebut. Dalam konteks ini, demokrasi elektoral tidak sepenuhnya berbasis pada relasi langsung warga-negara, melainkan dimediasi oleh jaringan patronase dan broker politik (Scott, 1972; Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Elite lokal ini mencakup berbagai aktor, seperti kyai, ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga preman. Mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat di tingkat lokal dan sering kali menjadi penentu arah dukungan politik masyarakat. Studi tentang politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa aktor-aktor ini berfungsi sebagai *political brokers* yang menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui jaringan informal, sekaligus mengelola distribusi sumber daya politik (Aspinall, 2014; Muhtadi, 2019). Dalam konteks ini, relasi antara kandidat dan elite lokal tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga

transaksional dan berbasis pertukaran kepentingan.

Fenomena ini membuka ruang bagi berkembangnya praktik yang oleh Eric Hobsbawm disebut sebagai *social banditry*, yaitu bentuk perbanditan yang memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dalam konteks politik elektoral, bandit sosial tidak selalu identik dengan kriminalitas, tetapi lebih pada peran sebagai aktor informal yang mengelola distribusi sumber daya politik sekaligus membangun hubungan patronase dengan masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa perbanditan sosial tidak lagi berada di luar sistem, melainkan menjadi bagian integral dari praktik kekuasaan lokal.

Lebih jauh, praktik ini juga dapat dipahami melalui konsep *moral economy* dari James C. Scott, yang menjelaskan bahwa tindakan ekonomi dan politik masyarakat tidak semata-mata didorong oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh norma-norma keadilan dan ekspektasi sosial. Dalam konteks politik elektoral, distribusi uang atau bantuan oleh kandidat sering kali tidak dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan demokrasi, melainkan sebagai kewajiban moral kandidat terhadap masyarakat. Dengan demikian, praktik politik transaksional memperoleh legitimasi sosial melalui kerangka nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, politik elektoral di tingkat lokal tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan institusional-formal, tetapi perlu dilihat sebagai praktik sosial yang melibatkan relasi kuasa, jaringan informal, dan legitimasi kultural. Dalam konteks ini, elite lokal memainkan peran strategis sebagai aktor yang tidak hanya menjembatani, tetapi juga mengonstruksi relasi antara negara dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada:

1. proses terbentuknya relasi kuasa antara kandidat dan elite lokal sebagai bandit sosial
2. mekanisme operasional perbanditan sosial dalam politik elektoral
3. dampak relasi tersebut terhadap demokrasi lokal

Untuk membahas persoalan tersebut, beberapa konsep berikut akan digunakan secara a posteriori.

1. 1. *Social Banditry* dan Transformasi Aktor Informal dalam Politik Lokal

Konsep *social banditry* yang diperkenalkan oleh Eric Hobsbawm merupakan salah satu pendekatan klasik dalam memahami relasi antara masyarakat, kekuasaan, dan resistensi. Hobsbawm (1959; 1969) mendefinisikan bandit sosial sebagai individu atau kelompok yang secara formal dianggap melanggar hukum oleh negara, tetapi secara sosial dipandang sebagai pembela kepentingan rakyat kecil. Dalam konteks masyarakat agraris, bandit sosial sering kali muncul sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan dominasi elite.

Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, konsep ini mengalami transformasi. Bandit sosial tidak lagi selalu berada di luar sistem, tetapi justru dapat beroperasi di dalam struktur kekuasaan itu sendiri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal di negara berkembang, aktor-aktor informal yang memiliki basis sosial kuat sering berperan sebagai mediator antara negara dan masyarakat (Blok, 1972; Sidel, 1999). Mereka mengelola akses terhadap sumber daya, memobilisasi dukungan politik, dan dalam banyak kasus memperoleh legitimasi dari masyarakat karena dianggap mampu “mengurus” kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak dalam peran elite lokal seperti kyai, tokoh adat, pengusaha lokal, hingga aktor kekerasan informal (preman) yang memiliki jaringan sosial luas. Mereka tidak

hanya berfungsi sebagai perantara politik (*political brokers*), tetapi juga sebagai aktor yang mengontrol distribusi sumber daya politik dan ekonomi (Aspinall, 2014; Hadiz, 2010). Dengan demikian, *social banditry* dalam konteks politik elektoral dapat dipahami sebagai bentuk transformasi peran bandit sosial dari aktor resistensi menjadi aktor kolaboratif dalam struktur kekuasaan lokal.

1. 2. *Moral Economy* dan Legitimasi Sosial dalam Politik Elektoral

Selain dimensi kekuasaan, praktik politik elektoral di tingkat lokal juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan kultural. Konsep *moral economy* yang dikembangkan oleh James C. Scott memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana tindakan ekonomi dan politik masyarakat dipandu oleh norma-norma keadilan sosial dan ekspektasi kolektif (Scott, 1976).

Scott menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, terdapat standar moral mengenai distribusi sumber daya yang dianggap adil. Ketika standar ini dilanggar, masyarakat dapat merespons melalui resistensi. Namun, dalam konteks politik modern, konsep ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik yang secara normatif dianggap menyimpang—seperti politik uang—justru dapat memperoleh legitimasi sosial.

Dalam politik elektoral di Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa distribusi uang, bantuan, atau fasilitas oleh kandidat sering kali tidak dipersepsikan sebagai bentuk korupsi, tetapi sebagai kewajiban moral atau bentuk perhatian terhadap masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019). Pemilih tidak semata-mata bertindak sebagai agen rasional yang menghitung keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang beroperasi dalam kerangka nilai dan norma lokal.

Dengan demikian, praktik politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai bentuk “ekonomi moral politik”, di mana pertukaran material antara kandidat dan pemilih dilegitimasi oleh norma sosial tentang keadilan, timbal balik, dan kewajiban sosial. Perspektif ini penting untuk menghindari reduksi fenomena politik lokal semata-mata sebagai praktik koruptif, tanpa memahami konteks sosial yang melatarbelakanginya.

1. 3. Relasi Kuasa dan Jaringan Kekuasaan dalam Politik Lokal

Untuk memahami bagaimana elite lokal dan bandit sosial beroperasi dalam politik elektoral, diperlukan kerangka analisis mengenai relasi kuasa. Dalam hal ini, pemikiran Michel Foucault menjadi relevan. Foucault (1978; 1980) memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki secara eksklusif oleh aktor tertentu, melainkan sebagai jaringan relasi yang tersebar dalam berbagai praktik sosial.

Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal negara, tetapi juga melalui relasi sehari-hari, norma, dan praktik sosial yang membentuk perilaku individu. Dengan demikian, kekuasaan bersifat produktif sekaligus relasional—ia tidak hanya menindas, tetapi juga membentuk dan mengarahkan tindakan.

Dalam konteks politik lokal, relasi kuasa tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor perantara seperti elite lokal. Mereka menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang menghubungkan kandidat politik dengan pemilih. Melalui jaringan ini, kekuasaan dijalankan dalam bentuk distribusi sumber daya, mobilisasi dukungan, dan kontrol sosial terhadap perilaku politik masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bahwa praktik politik elektoral bukan sekadar proses institusional, tetapi

merupakan arena interaksi berbagai kekuatan yang saling bernegosiasi. Elite lokal sebagai bandit sosial tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa dalam masyarakat.

1. 4. Sintesis Teoretis: Bandit Sosial, Moral Economy, dan Relasi Kuasa

Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut, penelitian ini membangun kerangka analisis yang melihat politik elektoral sebagai arena interaksi antara

1. aktor informal (bandit sosial) yang mengelola jaringan dan sumber daya
2. norma sosial (moral economy) yang melegitimasi praktik pertukaran politik
3. relasi kuasa (power relations) yang membentuk struktur interaksi antara kandidat, elite, dan masyarakat

Sintesis ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena politik lokal, yang tidak hanya menjelaskan “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa praktik tersebut dapat berlangsung dan diterima secara sosial”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif, yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, serta konstruksi sosial yang dibentuk oleh para aktor dalam konteks politik elektoral lokal. Pendekatan interpretif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada fenomena yang tampak, tetapi juga pada makna subjektif yang melandasi tindakan para pelaku, khususnya dalam relasi antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat (Neuman, 2014; Lincoln & Denzin, 2017).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan desain deskriptif-etnografis. Pendekatan etnografis memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam

praktik sosial, relasi kuasa, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktik politik elektoral. Dalam hal ini, etnografi tidak hanya dipahami sebagai teknik pengumpulan data, tetapi sebagai pendekatan analitis untuk memahami realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz dan David M. Fetterman.

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember sebagai lokasi utama, dengan perluasan observasi di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Tapal Kuda memiliki karakteristik sosial yang khas, ditandai dengan kuatnya pengaruh elite lokal seperti kyai, tokoh agama, dan jaringan informal lainnya dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang meliputi kandidat pemilihan kepala daerah, tim pemenangan, elite lokal (seperti kyai, ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, dan aktor informal lainnya), serta masyarakat pemilih. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi data yang lebih fleksibel dan mendalam. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk memahami praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam konteks politik elektoral, termasuk interaksi antara kandidat dan elite lokal serta dinamika mobilisasi dukungan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen, baik berupa arsip resmi, laporan media, maupun materi kampanye yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan posisi, peran, dan

relevansi informan terhadap fokus penelitian (Neuman, 2014). Selain itu, teknik *snowball sampling* juga digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang memiliki keterkaitan dengan jaringan elite lokal dan praktik politik elektoral.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif-deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola relasi kuasa, praktik perbanditan sosial, serta konstruksi moral ekonomi dalam politik elektoral. Dalam proses analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan *thick description* sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz, yaitu upaya untuk memberikan deskripsi yang mendalam, kontekstual, dan interpretatif terhadap fenomena sosial yang diteliti.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode (Lincoln & Denzin, 2017). Selain itu, interpretasi data juga didiskusikan secara reflektif untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi kuasa antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat, serta bagaimana praktik perbanditan sosial dan politik moral terbentuk dan dilegitimasi dalam konteks politik elektoral di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Struktur Sosial Tapal Kuda dan Basis Peran Elite Lokal

Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur memiliki karakteristik sosial yang khas yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia. Struktur sosial di kawasan ini tidak hanya dibentuk oleh institusi formal, tetapi juga oleh jaringan sosial-kultural

yang kuat, terutama yang berbasis pada tradisi pesantren, hubungan patronase, serta relasi keagamaan antara kyai dan santri. Dalam banyak kasus, struktur ini menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku sosial dan politik masyarakat.

Dominasi kultur pesantren merupakan salah satu ciri utama masyarakat Tapal Kuda. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat otoritas moral dan sosial. Posisi kyai dalam struktur ini sangat strategis karena tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur yang memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menentukan sikap dan pilihan masyarakat. Relasi kyai-santri yang bersifat hierarkis dan paternalistik menciptakan pola kepatuhan yang tinggi, yang dalam konteks politik dapat bertransformasi menjadi dukungan elektoral yang signifikan.

Hal ini tergambar dari pernyataan salah satu informan di Jember yang menyatakan:

“Kalau kyai sudah bilang pilih siapa, biasanya santri dan masyarakat sekitar ikut. Itu bukan karena dipaksa, tapi karena percaya.” (Wawancara, tokoh masyarakat, Jember)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa relasi kepatuhan dalam konteks keagamaan bertransformasi menjadi kepatuhan politik, yang memperkuat posisi kyai sebagai aktor strategis dalam mobilisasi suara.

Selain itu, struktur patronase juga menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Hubungan patron-klien yang terbentuk antara elite lokal dan masyarakat menciptakan ketergantungan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Elite lokal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan akses terhadap sumber daya, termasuk bantuan ekonomi, pekerjaan, hingga akses terhadap kekuasaan politik.

Seorang informan dari Banyuwangi menjelaskan:

“Masyarakat itu ikut siapa yang bisa bantu mereka. Kalau ada orang yang sering kasih bantuan, ya otomatis didukung waktu pemilihan.” (Wawancara, tim sukses, Banyuwangi)

Kutipan ini memperlihatkan bahwa relasi patronase tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga material, yang kemudian menjadi dasar pembentukan loyalitas politik.

Di sisi lain, terdapat pula aktor-aktor dengan basis kekuasaan informal, seperti preman atau *local strongmen*, yang memiliki pengaruh melalui jaringan sosial dan kapasitas kontrol di tingkat lokal. Mereka sering kali berperan dalam mobilisasi massa dan pengamanan aktivitas politik. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan di Situbondo:

“Kalau mau aman dan suara terkumpul, ya harus lewat orang-orang lapangan. Mereka yang tahu siapa bisa digerakkan.” (Wawancara, elite lokal, Situbondo)

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam politik lokal tidak hanya berbasis legitimasi moral atau ekonomi, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan jaringan sosial secara langsung. Selain legitimasi moral dan kekuasaan informal, dimensi ekonomi juga menjadi sumber kekuatan elite lokal. Pengusaha lokal sering kali menjadi penyokong logistik politik dan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah dukungan politik.

Ketiga bentuk legitimasi—moral, informal, dan ekonomi—tidak berdiri sendiri, melainkan saling beririsan dan membentuk jaringan kekuasaan yang kompleks. Dalam banyak kasus, aktor yang paling berpengaruh adalah mereka yang mampu mengombinasikan ketiganya. Dalam perspektif relasi kuasa sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tersebar dalam jaringan sosial yang melibatkan berbagai aktor, bukan hanya berada dalam institusi formal negara. Elite

lokal menjadi bagian dari jaringan tersebut dengan memainkan peran sebagai penghubung sekaligus pengendali relasi antara masyarakat dan kekuasaan politik.

Lebih jauh, jika dilihat melalui perspektif *social banditry* dari Eric Hobsbawm, elite lokal dapat dipahami sebagai bentuk transformasi bandit sosial modern. Mereka tidak lagi berada di luar sistem sebagai aktor resistensi, tetapi justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat karena dianggap mampu mengelola dan mendistribusikan sumber daya. Sementara itu, melalui perspektif *moral economy* dari James C. Scott, penerimaan masyarakat terhadap peran elite lokal tidak dapat dilepaskan dari norma keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Elite lokal dipandang sebagai pihak yang “mengurus” kepentingan masyarakat, sehingga praktik distribusi sumber daya oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diharapkan.

Dengan demikian, struktur sosial Tapal Kuda tidak hanya menyediakan konteks bagi munculnya elite lokal, tetapi juga menjadi basis yang memperkuat peran mereka dalam politik elektoral. Elite lokal tidak sekadar aktor tambahan, melainkan elemen struktural yang menentukan bagaimana relasi kuasa terbentuk, dijalankan, dan direproduksi dalam proses politik di tingkat lokal.

3. 2. Proses Terbentuknya Relasi Kuasa antara Kandidat dan Elite Lokal

Relasi kuasa antara kandidat dan elite lokal dalam politik elektoral di wilayah Tapal Kuda tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap, terstruktur, dan berulang dalam setiap siklus pemilihan. Berdasarkan temuan lapangan, proses ini dapat dipahami dalam tiga tahap utama, yaitu identifikasi basis massa, negosiasi dengan elite lokal, dan mobilisasi politik.

3.2.a. Identifikasi Basis Massa

Tahap awal dalam pembentukan relasi kuasa dimulai dari upaya kandidat atau tim pemenang untuk memetakan basis sosial dan geografis pemilih. Identifikasi ini tidak hanya berbasis pada data administratif atau statistik elektoral, tetapi juga sangat bergantung pada pengetahuan lokal yang dimiliki oleh elite setempat. Dalam konteks Tapal Kuda, basis massa sering kali terstruktur berdasarkan jaringan sosial keagamaan, kekerabatan, serta afiliasi komunitas. Oleh karena itu, kandidat membutuhkan informasi yang tidak dapat diperoleh secara formal, melainkan melalui perantara elite lokal.

Seorang informan dari tim pemenang di Jember menyatakan:

“Kami tidak bisa langsung masuk ke masyarakat. Harus tahu dulu siapa yang berpengaruh di situ, siapa kiai-nya, siapa tokoh yang didengar.” (Wawancara, tim sukses, Jember)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi basis massa tidak bersifat netral, tetapi sudah sejak awal melibatkan relasi kuasa, di mana elite lokal menjadi “penjaga gerbang” (*gatekeeper*) terhadap akses politik kandidat ke masyarakat. Dalam perspektif Michel Foucault, pengetahuan tentang masyarakat (*knowledge*) menjadi bagian integral dari praktik kekuasaan (*power*). Siapa yang menguasai pengetahuan lokal, dialah yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah relasi politik.

3.2.b. Negosiasi dengan Elite Lokal

Tahap kedua merupakan inti dari proses pembentukan relasi kuasa, yaitu negosiasi antara kandidat dan elite lokal. Pada tahap ini, relasi yang semula bersifat potensial berubah menjadi relasi transaksional yang konkret. Negosiasi biasanya mencakup dua aspek utama, yaitu komitmen dukungan suara dari elite lokal

dan imbalan material atau akses terhadap sumber daya politik

Seorang elite lokal di Situbondo mengungkapkan secara eksplisit:

“Kami ini tidak gratis. Kalau kami diminta dukung, ya harus jelas juga apa yang didapat masyarakat dan kami.” (Wawancara, elite lokal, Situbondo)

Sementara itu, informan lain dari tim kandidat di Banyuwangi menyatakan:

“Biasanya sudah ada hitung-hitungan. Berapa suara yang bisa dibawa, dan apa kompensasinya.” (Wawancara, tim sukses, Banyuwangi)

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terbentuk bersifat simbiotik sekaligus transaksional. Kandidat membutuhkan legitimasi sosial dan akses ke massa, sementara elite lokal membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Dalam kerangka *social banditry* dari Eric Hobsbawm, elite lokal dalam konteks ini dapat dipahami sebagai “bandit sosial modern” yang mengelola distribusi sumber daya politik. Mereka tidak sekadar menjadi perantara, tetapi juga aktor yang memiliki daya tawar tinggi dalam menentukan konfigurasi kekuasaan.

Namun demikian, praktik ini tidak selalu dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan oleh masyarakat. Melalui perspektif *moral economy* dari James C. Scott, transaksi tersebut sering dipahami sebagai bagian dari norma timbal balik (*reciprocity*), di mana dukungan politik dianggap layak mendapatkan balasan material.

3.2.c. Mobilisasi Politik

Tahap terakhir adalah mobilisasi politik, yaitu implementasi dari kesepakatan yang telah dibangun antara kandidat dan elite lokal. Pada tahap ini, elite lokal berperan aktif dalam menggerakkan massa untuk memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Mobilisasi dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya (1) pendekatan

keagamaan melalui jaringan pesantren, (2) distribusi bantuan atau logistik politik, dan (3) penggunaan jaringan sosial informal

Seorang informan dari kalangan masyarakat di Jember menjelaskan:

“Biasanya ada pertemuan kecil, terus disampaikan siapa yang harus dipilih. Kadang juga ada bantuan, ya masyarakat merasa diperhatikan.” (Wawancara, pemilih, Jember)

Di sisi lain, aktor dengan basis kekuasaan informal juga memainkan peran penting:

“Kalau sudah dekat hari pemilihan, kami yang turun langsung ke lapangan, memastikan orang-orang datang dan memilih.” (Wawancara, koordinator lapangan, Banyuwangi)

Mobilisasi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak berhenti pada tahap negosiasi, tetapi berlanjut dalam praktik konkret yang melibatkan kontrol sosial, distribusi sumber daya, dan bahkan tekanan sosial dalam batas tertentu. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui praktik-praktik sehari-hari yang tersebar dalam jaringan sosial. Mobilisasi politik merupakan bentuk konkret dari bagaimana kekuasaan dijalankan, bukan hanya dimiliki.

3.2.d. Sintesis Analitis

Ketiga tahap tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa antara kandidat dan elite lokal bersifat terstruktur (melalui tahapan yang sistematis), relasional (bergantung pada interaksi antaraktor), dan transaksional (melibatkan pertukaran sumber daya). Lebih jauh, proses ini memperlihatkan bahwa politik elektoral di tingkat lokal tidak dapat dipahami semata sebagai kompetisi formal, tetapi sebagai arena negosiasi kekuasaan yang melibatkan aktor formal dan informal secara simultan. Dengan demikian, relasi kuasa yang terbentuk tidak hanya menentukan hasil pemilihan, tetapi juga menjadi dasar bagi konfigurasi kekuasaan pasca-pemilihan, termasuk dalam proses

pengambilan kebijakan dan distribusi sumber daya di tingkat lokal.

3.3. Mekanisme Perbanditan Sosial dalam Politik Elektoral

Perbanditan sosial dalam konteks pemilihan kepala daerah di wilayah Tapal Kuda tidak hadir dalam bentuk kriminalitas konvensional, melainkan termanifestasi dalam praktik-praktik politik yang bersifat informal, transaksional, dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perbanditan sosial bekerja melalui mekanisme yang terorganisasi dan sistematis, terutama dalam tiga bentuk utama: distribusi uang, pembagian sembako, dan pengamanan suara.

3.3.a. Distribusi Uang sebagai Instrumen Mobilisasi Politik

Distribusi uang merupakan salah satu mekanisme paling dominan dalam praktik perbanditan sosial. Namun, praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai “politik uang” dalam pengertian normatif, melainkan sebagai bagian dari relasi sosial yang lebih kompleks.

Seorang informan dari Banyuwangi menyatakan:

“Kalau tidak ada uang, orang juga bingung. Mereka butuh bukti kalau *kandidat itu serius*.” (Wawancara, tim sukses, Banyuwangi)

Sementara itu, seorang pemilih di Situbondo mengungkapkan:

“Dikasih ya diterima, itu sudah biasa. Tapi tetap kita lihat siapa yang dekat dengan kita.” (Wawancara, pemilih, Situbondo)

Kutipan ini menunjukkan bahwa distribusi uang tidak selalu dipersepsikan sebagai praktik yang sepenuhnya negatif, tetapi sebagai bagian dari norma timbal balik dalam hubungan sosial. Dalam perspektif *moral economy* dari James C. Scott, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk “redistribusi” yang dianggap wajar dalam kerangka keadilan sosial lokal, di

mana elite atau kandidat diharapkan berbagi sumber daya dengan masyarakat.

3.3.b. Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial

Selain uang tunai, distribusi sembako dan bantuan sosial juga menjadi instrumen penting dalam mekanisme perbanditan sosial. Bantuan ini sering dikemas dalam bentuk kegiatan sosial atau keagamaan, sehingga tidak selalu tampak sebagai bagian dari strategi politik secara eksplisit.

Seorang informan dari Jember menjelaskan:

“Biasanya menjelang pemilihan, banyak bantuan sembako. Disalurkan lewat tokoh-tokoh lokal supaya lebih dipercaya.” (Wawancara, tokoh masyarakat, Jember)

Praktik ini menunjukkan bahwa elite lokal berperan sebagai mediator legitimasi, yang memastikan bahwa bantuan tersebut tidak hanya diterima secara material, tetapi juga diakui secara sosial sebagai bentuk kepedulian kandidat terhadap masyarakat. Dalam kerangka *social banditry* dari Eric Hobsbawm, praktik ini mencerminkan transformasi bandit sosial modern, di mana distribusi sumber daya menjadi basis legitimasi sosial. Elite lokal yang menyalurkan bantuan tersebut memperoleh posisi sebagai “pembela” atau “perwakilan” kepentingan masyarakat, meskipun dalam praktiknya mereka juga terlibat dalam relasi transaksional dengan kandidat.

3.3.c. Pengamanan Suara dan Kontrol Sosial

Mekanisme lain yang tidak kalah penting adalah pengamanan suara, yang melibatkan upaya memastikan bahwa dukungan yang telah dinegosiasikan benar-benar terealisasi dalam bentuk suara pada hari pemilihan.

Seorang koordinator lapangan di Banyuwangi mengungkapkan:

“Tugas kami memastikan orang-orang yang sudah dijanjikan itu benar-benar datang dan

memilih.” (Wawancara, koordinator lapangan, Banyuwangi)

Dalam beberapa kasus, pengamanan suara tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga melibatkan tekanan sosial yang halus melalui jaringan komunitas.

“Kalau sudah satu kampung diarahkan ke satu kandidat, biasanya tidak enak kalau berbeda sendiri.” (Wawancara, pemilih, Jember)

Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi politik tidak hanya bergantung pada insentif material, tetapi juga pada mekanisme kontrol sosial yang bekerja melalui norma kolektif dan tekanan komunitas. Dalam perspektif Michel Foucault, praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja secara difus melalui jaringan sosial, bukan hanya melalui paksaan formal. Pengamanan suara menjadi bagian dari praktik disipliner yang memastikan kepatuhan dalam kerangka relasi kuasa yang telah terbentuk.

3.3.d Peran Strategis Elite Lokal dalam Mekanisme Perbanditan Sosial

Dalam keseluruhan mekanisme tersebut, elite lokal memainkan peran yang sangat strategis dan multidimensional. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi sebagai aktor kunci yang mengelola seluruh proses distribusi dan mobilisasi.

Berdasarkan temuan lapangan, peran elite lokal dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi utama berikut.

1. Sebagai Broker Politik Elite lokal menjembatani hubungan antara kandidat dan masyarakat. Mereka menjadi aktor yang menghubungkan dua entitas yang secara struktural terpisah, sekaligus menentukan arah komunikasi dan negosiasi politik.
2. Sebagai Distributor Logistik Politik Elite lokal mengelola distribusi sumber daya, baik dalam bentuk uang, sembako, maupun bantuan lainnya. Dalam peran ini, mereka memiliki

kontrol atas siapa yang menerima dan bagaimana distribusi tersebut dilakukan.

3. Sebagai Pengendali Jaringan Sosial Elite lokal memiliki kapasitas untuk menggerakkan dan mengontrol jaringan sosial di tingkat komunitas. Mereka tidak hanya memobilisasi dukungan, tetapi juga memastikan konsistensi pilihan politik melalui mekanisme sosial yang informal.

3.3.e Sintesis: Perbanditan Sosial sebagai Sistem

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbanditan sosial dalam politik elektoral bukanlah praktik yang sporadis, melainkan sebuah sistem yang terorganisasi. Sistem ini bekerja melalui

- a. distribusi sumber daya (uang dan barang)
- b. legitimasi sosial (melalui elite lokal)
- c. kontrol jaringan (melalui mobilisasi dan pengamanan suara)

Perbanditan sosial dalam konteks ini bukan sekadar penyimpangan dari demokrasi, tetapi justru menjadi bagian dari cara kerja demokrasi lokal itu sendiri. Ia beroperasi di antara batas formal dan informal, antara norma hukum dan norma sosial. Dengan demikian, memahami politik elektoral di wilayah Tapal Kuda tanpa melihat mekanisme perbanditan sosial akan menghasilkan analisis yang tidak utuh. Perbanditan sosial bukan hanya gejala, tetapi merupakan struktur yang membentuk relasi kuasa dan menentukan dinamika politik lokal secara keseluruhan.

3.4. Moral Economy dalam Politik Uang: Normalisasi Sosial dalam Politik Elektoral

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa praktik politik uang di wilayah Tapal Kuda tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui perspektif normatif yang melihatnya sebagai

penyimpangan demokrasi. Sebaliknya, dalam perspektif masyarakat lokal, praktik tersebut justru memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dianggap sebagai bagian yang wajar dalam proses politik.

Temuan lapangan menunjukkan adanya konstruksi makna yang berbeda terkait uang dan bantuan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Bagi sebagian masyarakat, uang yang diberikan oleh kandidat tidak dipersepsikan sebagai bentuk suap, melainkan sebagai hak yang layak diterima oleh pemilih.

Seorang informan di Situbondo menyatakan:

“Kalau ada calon, ya wajar kalau kasih. Itu sudah seperti kewajiban, bukan soal beli suara.” (Wawancara, pemilih, Situbondo)

Pernyataan serupa juga muncul dari informan di Jember:

“*Kami memilih, mereka butuh suara kami. Jadi ya ada timbal balik.*” (Wawancara, pemilih, Jember)

Kutipan ini menunjukkan bahwa relasi antara kandidat dan pemilih dipahami dalam kerangka pertukaran sosial, bukan semata hubungan politik formal. Dalam konteks ini, bantuan yang diberikan kandidat—baik dalam bentuk uang, sembako, maupun fasilitas lainnya—dipandang sebagai kewajiban moral kandidat kepada masyarakat.

Dalam perspektif *moral economy* yang dikemukakan oleh James C. Scott, kondisi ini mencerminkan adanya norma keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat, di mana distribusi sumber daya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Scott menekankan bahwa tindakan ekonomi dan politik masyarakat tidak selalu didasarkan pada rasionalitas utilitarian, tetapi juga pada ekspektasi moral mengenai keadilan dan kewajiban.

Dalam konteks Tapal Kuda, *moral economy* ini membentuk kerangka berpikir masyarakat bahwa

- a. kandidat yang tidak memberikan bantuan dianggap “tidak peduli”
- b. pemberian bantuan menjadi indikator keseriusan dan kelayakan kandidat
- c. penerimaan bantuan tidak menghilangkan otonomi memilih, tetapi menjadi bagian dari relasi sosial

Seorang tokoh masyarakat di Banyuwangi menjelaskan:

“Kalau calon tidak turun dan tidak berbagi, masyarakat juga tidak merasa punya hubungan.” (Wawancara, tokoh masyarakat, Banyuwangi)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hubungan politik dibangun melalui praktik-praktik konkret yang bersifat material sekaligus simbolik. Bantuan yang diberikan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat.

3.4.a Normalisasi Politik Uang sebagai Praktik Sosial

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya normalisasi politik uang dalam kehidupan politik lokal. Politik uang tidak lagi dipandang sebagai praktik yang menyimpang, tetapi sebagai bagian dari “aturan main” yang diterima secara luas. Dalam banyak kasus, bahkan terdapat tekanan sosial tidak langsung terhadap kandidat untuk melakukan praktik tersebut. Kandidat yang tidak mengikuti pola ini berisiko kehilangan dukungan karena dianggap tidak memahami “budaya lokal”.

Seorang informan dari tim sukses di Jember menyatakan:

“Kalau tidak ikut pola seperti ini, sulit menang. Masyarakat sudah punya ekspektasi.” (Wawancara, tim sukses, Jember)

Normalisasi ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya didorong oleh kandidat, tetapi juga oleh struktur ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, praktik ini bersifat resiprokal, di mana kandidat dan pemilih sama-sama terlibat dalam reproduksi sistem tersebut.

3.4.b Relasi dengan Perbanditan Sosial

Dalam kerangka *social banditry* dari Eric Hobsbawm, normalisasi politik uang ini semakin memperkuat posisi elite lokal sebagai bandit sosial modern. Elite lokal tidak hanya menjadi distributor sumber daya, tetapi juga menjadi aktor yang menjembatani norma moral masyarakat dengan praktik politik yang berlangsung. Mereka berperan dalam (1) menerjemahkan bantuan sebagai “kewajaran sosial”, (2) memastikan distribusi berjalan sesuai ekspektasi masyarakat, dan (3) menjaga legitimasi kandidat di tingkat lokal. Dengan demikian, perbanditan sosial tidak hanya bekerja pada level praktik, tetapi juga pada level makna, yaitu bagaimana praktik tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat.

3.4.c Sintesis

Dengan demikian, moral economy dalam politik elektoral di Tapal Kuda menunjukkan bahwa politik uang tidak dapat direduksi sebagai praktik ilegal semata, tetapi harus dipahami sebagai fenomena sosial yang berakar pada norma, nilai, dan ekspektasi masyarakat. Normalisasi politik uang bukan hanya hasil dari strategi kandidat, tetapi merupakan produk dari interaksi kompleks antara struktur sosial, relasi kuasa, dan nilai-nilai moral masyarakat. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa praktik tersebut sulit dihilangkan, karena ia telah menjadi bagian dari logika sosial yang mengatur hubungan antara masyarakat dan kekuasaan.

3.5. Dampak Relasi Kuasa terhadap Demokrasi Lokal

Relasi kuasa yang terbentuk antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat dalam politik elektoral di wilayah Tapal Kuda tidak berhenti pada proses pemilihan semata, tetapi berlanjut hingga tahap

pasca-elektoral dan memengaruhi secara signifikan kualitas demokrasi lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi ini menghasilkan tiga dampak utama, yaitu politik biaya tinggi, ketergantungan kepala daerah terhadap elite lokal, dan distorsi dalam proses kebijakan publik.

3.5.a Politik Biaya Tinggi

Salah satu konsekuensi paling nyata dari mekanisme perbanditan sosial dan moral economy adalah meningkatnya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah. Kandidat tidak hanya mengeluarkan biaya untuk kampanye formal, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan relasi dengan elite lokal serta memenuhi ekspektasi masyarakat melalui distribusi sumber daya.

Seorang informan dari tim pemenangan di Banyuwangi mengungkapkan:

“Biaya terbesar bukan di kampanye resmi, tapi di lapangan—untuk jaringan, untuk logistik, untuk menjaga suara.” (Wawancara, tim sukses, Banyuwangi)

Hal ini menunjukkan bahwa biaya politik tidak lagi bersifat terbuka dan terukur, tetapi tersebar dalam berbagai praktik informal yang sulit dikontrol. Dalam konteks ini, kemenangan dalam pilkada sangat ditentukan oleh kapasitas finansial kandidat untuk mengelola jaringan perbanditan sosial. Dalam perspektif *social banditry* dari Eric Hobsbawm, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya menjadi instrumen utama dalam membangun legitimasi dan dukungan politik. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya ketergantungan pada sumber daya ekonomi sebagai basis kekuasaan politik.

3.5.b. Ketergantungan Kepala Daerah terhadap Elite Lokal

Relasi transaksional yang dibangun selama proses pemilihan tidak berakhir setelah kandidat terpilih sebagai kepala daerah. Sebaliknya, relasi tersebut

berlanjut dalam bentuk ketergantungan struktural terhadap elite lokal yang telah berkontribusi dalam kemenangan politik.

Seorang informan di Jember menyatakan “*Setelah menang, ya tidak bisa lepas. Mereka yang dulu bantu pasti minta diperhatikan.*” (Wawancara, tokoh masyarakat, Jember)

Ketergantungan ini dapat berupa (1) pemberian akses terhadap proyek pemerintah, (2) distribusi jabatan birokrasi, dan (3) pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Dalam perspektif relasi kuasa Michel Foucault, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor, tetapi tersebar dalam jaringan relasi yang saling mengikat. Kepala daerah tidak sepenuhnya otonom, melainkan menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas yang melibatkan elite lokal. Akibatnya, ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan menjadi terbatas oleh komitmen politik yang telah dibangun sebelumnya.

3.5.c. Distorsi Kebijakan Publik

Dampak lanjutan dari ketergantungan tersebut adalah terjadinya distorsi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berbasis pada kepentingan publik, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite yang memiliki kontribusi dalam proses elektoral.

Seorang informan dari kalangan birokrasi lokal mengungkapkan “*Kadang kebijakan bukan soal kebutuhan masyarakat, tapi soal siapa yang dulu mendukung.*” (Wawancara, birokrat daerah)

Fenomena ini menunjukkan bahwa proses kebijakan mengalami pergeseran dari prinsip rasionalitas publik menuju rasionalitas politik yang berbasis pada balas jasa dan distribusi kepentingan. Dalam perspektif *moral economy* dari

James C. Scott, kondisi ini dapat dipahami sebagai perpanjangan dari logika timbal balik yang telah terbentuk sejak proses pemilihan. Jika masyarakat menganggap bantuan sebagai “hak”, maka elite lokal juga menganggap akses terhadap kebijakan sebagai “balasan yang wajar”. Namun demikian, praktik ini berimplikasi pada melemahnya prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti akuntabilitas publik, transparansi kebijakan, dan orientasi pada kepentingan umum.

3.5.d Sintesis: Demokrasi dalam Bayang-Bayang Relasi Kuasa

Ketiga dampak tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal di wilayah Tapal Kuda beroperasi dalam kerangka relasi kuasa yang kompleks dan berlapis. Demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi arena reproduksi relasi kuasa antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat. Di satu sisi, relasi ini memungkinkan terbangunnya koneksi yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat melalui jaringan sosial yang ada. Namun di sisi lain, ia juga menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, dominasi elite dalam proses politik, pelemahan kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, demokrasi lokal dalam konteks ini dapat dipahami sebagai demokrasi yang terjebak dalam logika patronase dan perbanditan sosial, di mana proses formal tetap berjalan, tetapi substansi demokrasi mengalami distorsi.

3.6. Transformasi Bandit Sosial Modern dalam Politik Elektoral

Salah satu temuan paling penting dalam penelitian ini adalah terjadinya transformasi signifikan dalam konsep *social banditry* dalam konteks politik lokal kontemporer. Jika dalam formulasi klasiknya bandit sosial dipahami sebagai aktor yang berada di luar sistem dan sering kali berposisi melawan negara, maka

dalam konteks politik elektoral di wilayah Tapal Kuda, bandit sosial justru mengalami pergeseran peran yang mendasar. Bandit sosial tidak lagi berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan, tetapi bertransformasi menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan itu sendiri.

Dalam perspektif klasik Eric Hobsbawm, bandit sosial digambarkan sebagai figur yang memperoleh legitimasi dari masyarakat karena dianggap melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh elite atau negara. Mereka sering diposisikan sebagai “pahlawan rakyat” yang berada di luar sistem formal. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik elektoral modern, posisi tersebut telah berubah secara fundamental.

3.6.a Dari Resistensi ke Kolaborasi

Transformasi utama yang terjadi adalah pergeseran dari pola resistensi menuju kolaborasi. Bandit sosial modern tidak lagi berada di luar sistem kekuasaan, melainkan justru berkolaborasi secara aktif dengan elite politik formal, khususnya kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Seorang informan dari Situbondo mengungkapkan “*Sekarang bukan zamannya melawan. Justru kalau dekat dengan kekuasaan, kita bisa lebih kuat dan membantu masyarakat.*” (Wawancara, elite lokal, Situbondo)

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari konfrontasi menuju integrasi dalam sistem kekuasaan. Elite lokal yang berperan sebagai bandit sosial melihat kolaborasi dengan kandidat sebagai strategi untuk mempertahankan sekaligus memperluas pengaruh mereka.

3.6.b Bandit Sosial sebagai Aktor Institusional Informal

Dalam konteks ini, bandit sosial tidak lagi dapat dipahami sebagai aktor marginal, melainkan sebagai bagian dari apa yang dapat disebut sebagai institusi informal dalam politik lokal. Mereka

memainkan peran strategis dalam menghubungkan kandidat dengan masyarakat, mengelola distribusi sumber daya politik, dan mengontrol jaringan sosial di tingkat lokal

Seorang informan dari Banyuwangi menyatakan “*Kami ini seperti penghubung. Kandidat butuh kami, masyarakat juga butuh kami.*” (Wawancara, elite lokal, Banyuwangi)

Peran ini menunjukkan bahwa bandit sosial modern beroperasi sebagai **broker kekuasaan**, yang tidak hanya memediasi relasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menentukan arah dan hasil dari interaksi politik tersebut.

3.6.c Legitimasi Sosial dalam Kerangka *Moral Economy*

Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks moral economy yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif James C. Scott, legitimasi bandit sosial modern tidak semata-mata berasal dari tindakan mereka, tetapi dari kemampuan mereka memenuhi ekspektasi sosial masyarakat.

Bandit sosial memperoleh legitimasi karena dianggap mampu “membawa” sumber daya dari kandidat, berperan dalam redistribusi ekonomi di tingkat lokal, dan menjaga hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Dengan demikian, kolaborasi dengan elite politik tidak dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat, melainkan sebagai strategi untuk memenuhi tuntutan moral dan sosial yang ada.

3.6.d Relasi Kuasa yang Bersifat Simbiotik

Transformasi bandit sosial juga mencerminkan perubahan dalam pola relasi kuasa. Relasi antara kandidat dan bandit sosial bersifat simbiotik, di mana kedua pihak saling membutuhkan dan saling memperkuat. Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi ini menunjukkan

bahwa kekuasaan tidak bersifat hierarkis semata, tetapi bekerja melalui jaringan relasi yang saling terhubung. Bandit sosial tidak berada di bawah atau di luar kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme yang memproduksi dan mereproduksi kekuasaan itu sendiri.

3.6.e Implikasi Teoretis: Reinterpretasi Social Banditry

Temuan ini membawa implikasi teoretis penting terhadap konsep *social banditry*. Bandit sosial dalam konteks kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara dikotomis sebagai “melawan” atau “di luar” sistem. Sebaliknya, mereka harus dilihat sebagai aktor hibrid (antara formal dan informal), mediator kekuasaan, juga sebagai bagian dari struktur politik lokal. Dengan demikian, konsep bandit sosial perlu diinterpretasi sebagai fenomena yang dinamis, yang dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di wilayah Tapal Kuda tidak sepenuhnya berjalan dalam kerangka rasionalitas formal sebagaimana diasumsikan dalam teori demokrasi prosedural. Sebaliknya, dinamika politik elektoral sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial informal yang melibatkan elite lokal, relasi patronase, serta praktik distribusi sumber daya yang bersifat transaksional.

Demokrasi dalam konteks ini tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme kompetisi antar kandidat berbasis program dan preferensi rasional pemilih, melainkan sebagai arena interaksi kompleks antara aktor formal dan informal yang membentuk relasi kuasa secara dinamis. Jaringan elite lokal berfungsi sebagai infrastruktur sosial-politik yang

menjembatani sekaligus mengontrol hubungan antara kandidat dan masyarakat.

Integrasi tiga perspektif teoretis dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut. Pertama, konsep *social banditry* dari Eric Hobsbawm menjelaskan bagaimana elite lokal memperoleh legitimasi sosial sebagai aktor yang dianggap mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, legitimasi ini tidak lagi berbasis resistensi terhadap negara, tetapi pada kemampuan mereka mengelola distribusi sumber daya politik.

Kedua, perspektif *moral economy* dari James C. Scott membantu menjelaskan mengapa praktik politik uang dan distribusi bantuan tidak selalu dipersepsikan sebagai penyimpangan. Sebaliknya, praktik tersebut dipahami sebagai bagian dari norma keadilan sosial dan relasi timbal balik antara kandidat dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat tidak sepenuhnya didorong oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh ekspektasi moral yang hidup dalam konteks lokal.

Ketiga, konsep relasi kuasa dari Michel Foucault memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor, melainkan tersebar dalam jaringan sosial yang melibatkan berbagai pihak. Elite lokal, kandidat, dan masyarakat terhubung dalam relasi kuasa yang saling memengaruhi, di mana kekuasaan diproduksi dan direproduksi melalui praktik sehari-hari, termasuk dalam proses politik elektoral.

Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perbanditan sosial

dalam politik elektoral bukan sekadar deviasi dari demokrasi, tetapi merupakan bagian dari cara kerja demokrasi lokal itu sendiri. Demokrasi beroperasi dalam ruang yang tidak hanya diatur oleh institusi formal, tetapi juga oleh norma sosial, relasi kuasa, dan praktik informal yang saling berkelindan.

4. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan utama berikut.

Pertama, elite lokal memainkan peran kunci dalam politik elektoral sebagai aktor yang dapat dikategorikan sebagai bandit sosial modern. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara kandidat dan masyarakat, tetapi juga sebagai pengelola distribusi sumber daya politik dan pengendali jaringan sosial yang menentukan arah dukungan elektoral.

Kedua, relasi kuasa yang terbentuk antara kandidat, elite lokal, dan masyarakat bersifat transaksional sekaligus simbiotik. Relasi ini dibangun melalui pertukaran sumber daya, legitimasi sosial, dan dukungan politik, yang kemudian berlanjut hingga tahap pasca-elektoral dalam bentuk ketergantungan struktural antara kepala daerah dan jaringan elite pendukung.

Ketiga, praktik perbanditan sosial yang didukung oleh logika moral economy berkontribusi terhadap melemahnya kualitas demokrasi lokal. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi mengalami distorsi secara substantif, terutama dalam hal akuntabilitas, orientasi kebijakan publik, dan independensi pemimpin daerah.

Dengan demikian, politik elektoral di wilayah Tapal Kuda menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses rasional dan formal, tetapi harus dilihat sebagai

fenomena sosial yang kompleks, di mana relasi kuasa, norma moral, dan praktik informal memainkan peran yang sangat menentukan.

4.2 Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara praktis maupun teoretis, yang relevan bagi penguatan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Pertama, diperlukan reformasi dalam sistem pembiayaan politik untuk mengurangi ketergantungan kandidat terhadap praktik distribusi sumber daya yang tidak transparan. Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi penting untuk menekan politik biaya tinggi yang menjadi pintu masuk bagi praktik perbanditan sosial.

Kedua, penguatan pendidikan politik masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengubah persepsi terhadap politik uang dan relasi transaksional dalam politik. Pendidikan politik yang berkelanjutan dapat membantu membangun kesadaran kritis masyarakat agar lebih berorientasi pada program dan kualitas kandidat, bukan semata pada distribusi material.

Ketiga, diperlukan regulasi yang lebih jelas terkait peran broker politik atau elite lokal dalam proses elektoral. Meskipun peran mereka tidak dapat dihapus sepenuhnya karena telah menjadi bagian dari struktur sosial, pengaturan yang tepat dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan mendorong praktik politik yang lebih akuntabel.

Secara teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *social banditry* dengan menunjukkan bahwa bandit sosial dalam konteks kontemporer tidak lagi berada di luar sistem, tetapi menjadi bagian dari struktur kekuasaan politik. Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi konsep tersebut dalam studi politik lokal dan demokrasi di negara berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) melalui skema pendanaan penelitian internal. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan tersebut yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini.

REFERENSI

- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Berenschot, W. (2018). *The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy*. Cambridge University Press.
- Darsono. (2015). *Konstruksi nasionalisme pada mahasiswa Papua di Surabaya dalam perspektif multikulturalisme* (Disertasi). Universitas Airlangga.
- Darsono. (2021a). Multiloyalty and new nationalism in Indonesian young generations who join ethnic-primordial student associations. *International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)*, 9(2). DOI: 10.26821/IJSRC.9.2.2021.9213
- Darsono. (2021b). Penetrasi kapital dan bangkitnya nasionalisme etnis di Indonesia. *JUISPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 61–74. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i2>
- Darsono, & Lestari, R. A. (2024). Corporate social responsibility dan pembangunan desa: Relasi kuasa dan kepentingan dalam kebijakan lokal. *JUISPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3734>
- Fetterman, D. M. (2010). *Ethnography: Step-by-step* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Geertz, Clifford. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hobsbawm, Eric. (1969). *Bandits*. Weidenfeld & Nicolson.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Michel Foucault. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction*. Pantheon Books.
- Michel Foucault. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Ongkhokham. (1984). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Gramedia.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Scott, James C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Scott, James C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.

- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press.
- W. Lawrence Neuman. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.